



Implementasi Program Bantuan Cadangan Beras Pemerintah Di Desa Sumberbendo Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo

Nandina Putri¹, Rebecca Lorenzia², Rachel Nella³, Vidya Imanuari⁴

Prodi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur¹²³

Abstract

Received: 08 Juli 2024

Revised: 17 Juli 2024

Accepted: 28 Juli 2024

Salah satu penyebab kemiskinan di banyak negara, termasuk Indonesia adalah kurangnya kesanggupan untuk memenuhi kebutuhan dasar, terutama beras. Dengan adanya El Nino atau kekeringan dapat mengakibatkan gagal panen sehingga harga beras mengalami kenaikan. Untuk mengendalikan Inflasi harga beras, pemerintah Indonesia mengeluarkan Program Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang dilakukan sesuai dengan instruksi Presiden RI, Joko Widodo, dan diatur dalam Peraturan Badan Pangan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Cadangan Beras Pemerintah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan dari program bantuan pangan cadangan beras pemerintah di desa Sumberbendo. Metode penelitian yang digunakan adalah Penelitian Deskriptif dengan pendekatan Kualitatif. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumen. Analisis Data menggunakan model Miles dan Huberman, yaitu pengumpulan data, reduksi data, data Display, dan penarikan kesimpulan. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa implementasi program Cadangan Beras Pemerintah di Desa Sumberbendo Kecamatan Sumberasih dapat dianggap berhasil secara keseluruhan karena telah berhasil untuk meringankan beban masyarakat terkait kebutuhan pangan beras dan sesuai aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Meskipun demikian, terdapat beberapa kendala yang muncul dalam berbagai tahap pelaksanaannya.

Keywords: Implementasi Program, Inflasi Harga Beras, Kemiskinan, Program Bantuan Cadangan Beras Pemerintah (CBP)

(*) Corresponding Author: 21041010242@student.upnjatim.ac.id

How to Cite: Putri, N., Lorenzia, R., Nella, R., & Imanuari, V. (2024). Implementasi Program Bantuan Cadangan Beras Pemerintah Di Desa Sumberbendo Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(14), 774-782. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13741412>

PENDAHULUAN

Indonesia menjadi salah satu negara berkembang dengan jumlah populasi penduduk yang besar dan kekayaan sumber daya alam yang luas (Ayuningtyas, 2019). Namun, persoalan sosial yang menimpa masyarakat Indonesia, khususnya persoalan sosial ekonomi saat ini tidak dapat dipisahkan. Konsekuensi paling menakutkan dari masalah sosial ekonomi tersebut yakni adanya kemiskinan. Kemiskinan terjadi saat seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-harinya untuk mempertahankan kehidupannya (Hardinandar, 2019). Salah satu penyebab kemiskinan di banyak negara, termasuk Indonesia adalah kurangnya kesanggupan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Menurut, Badan Pusat Statistik (BPS) harga beras merangkak naik setiap tahunnya, hal tersebut yang menyebabkan tidak terpenuhinya kebutuhan pokok. Sedangkan, pada kenyataannya pangan menjadi salah satu kebutuhan dasar paling penting manusia yang memberikan

manfaat secara adil, merata, dan berkelanjutan sesuai dengan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Oleh karena itu, saat ini pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi atau mengurangi tingkat kemiskinan di Indonesia untuk menaikkan kesejahteraan hidup masyarakat dan menjadikan Indonesia semakin lebih baik lagi. Salah satu program nasional yang baru-baru ini dilakukan oleh pemerintah yaitu Penyaluran Program Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang dilakukan sesuai dengan instruksi Presiden RI, Joko Widodo, dan diatur dalam Peraturan Badan Pangan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Cadangan Beras Pemerintah sebagai bantuan untuk memenuhi kebutuhan pangan khususnya beras sebagai bentuk antisipasi dampak El Nino atau kekeringan yang mengakibatkan gagal panen sekaligus dalam rangka pengendalian inflasi. Bantuan ini digelontorkan selama tiga bulan yaitu September, Oktober, dan November 2023, dan setiap KPM mendapatkan 10 kg beras dalam tiga kali penyaluran.

Kabupaten Probolinggo menjadi salah satu daerah di wilayah Jawa Timur yang menerima bantuan. Menurut data dari BPS dan Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo, terdapat sebanyak 141.588 warga yang mendapatkan bantuan. Penyaluran bantuan pangan berupa beras ini diawali bagi penerima yang berada di wilayah Kecamatan Sumberasih sebanyak 5.541 penerima. Di Kecamatan Sumberasih, terdapat banyak desa, salah satunya Desa Sumberbendo yang merupakan salah satu desa tepat dimana Program Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) ini dibagikan kepada masyarakat setempat. Penerima bantuan di Desa Sumberbendo pada bulan September, Oktober, November sebanyak 461 penerima. Data tersebut mengalami pengurangan dari bulan April, yang awalnya 484 penerima, hal tersebut disebabkan adanya sensus penduduk warga sudah mampu dari data BPS. Namun, tidak menutup kemungkinan masih terdapat data yang belum valid. Penyaluran bantuan ini dilakukan oleh staff PT. POS Probolinggo di balai desa masing-masing. Setiap desa di monitoring atau diawasi oleh satu orang staff dari PT. POS Indonesia guna memastikan penyaluran bantuan pangan berupa beras tersebut lancar tanpa ada kendala apapun.

Dalam penelitian ini lokus penelitian ditetapkan pada Desa Sumberbendo, Kecamatan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo sebagai salah satu desa penerima bantuan Cadangan Beras Pemerintah (CBP). Lokus tersebut dipilih karena berdasarkan hasil observasi di lapangan cukup banyak warga yang sudah dianggap mampu namun masih mendapatkan bantuan tersebut. Hal tersebut disebabkan adanya data yang belum terblokir atau dihapus oleh pihak dinas sosial. Selain itu, sebagian besar masyarakat juga kurang paham dan peduli dengan mekanisme dan tujuan dari bantuan Cadangan Beras Pemerintah karena tidak adanya sosialisasi kepada masyarakat. Alhasil peneliti tertarik untuk menelaah lebih lanjut terkait dengan Implementasi penyaluran Cadangan Beras Pemerintah di Desa Sumberbendo berdasarkan penjelasan permasalahan di atas.

Berpacu pada penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh (Muslim et al., 2019) mengenai Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Kuranji Kota Padang menyatakan bahwasanya program tersebut belum dijalankan sesuai SOP yang ada dikarenakan masih ada masyarakat yang tidak

memahami program tersebut. Ditemukan sumber daya anggota dari Kelurahan, serta Tenaga Pendamping belum terlibat dalam pelaksanaan program. Disposisi petugas dalam pelaksanaan program BPNT masih kurang baik, karena belum adanya keinginan dari pemerintah terutama pemerintahan Kelurahan dalam mengoptimalkan pelaksanaan program tersebut. Serta, struktur birokrasi pada prosedur pelayanan dan struktur organisasi cukup rumit. Oleh karena itu, Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Kuranji Kota Padang, belum berjalan secara optimal dan sesuai yang diharapkan.

Namun, untuk memenuhi kekurangan penelitian sebelumnya, penelitian ini akan secara khusus menyelidiki Implementasi Program Cadangan Beras Pemerintah menggunakan kerangka pemikiran George c Edward III (1980) dalam Leo Agustino (2014:149) yang mencakup empat variabel yang bisa berpengaruh terhadap keberhasilan pelaksanaan kebijakan yaitu; sumberdaya, komunikasi, disposisi, dan struktur Birokrasi. Menurut Gordon dalam Pasolong (2010:58) dalam konsep Implementasi Kebijakan adalah semua aktivitas yang diarahkan kepada realisasi program. Sedangkan, indikator-indikator kinerja ini mengukur seberapa jauh ukuran dasar dan tujuan kebijakan dapat direalisasikan. Oleh karena itu, berdasarkan uraian latar belakang tersebut, peneliti melakukan penelitian mengenai “Implementasi Program Cadangan Beras Pemerintah di Desa Sumberbendo Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo”.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Nana Syaodih Sukmadinata (2011: 73) menyatakan bahwa tujuan penelitian deskriptif kualitatif adalah untuk menjelaskan dan mengilustrasikan fenomena yang terjadi, baik secara alamiah maupun rekayasa manusia. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Sumberbendo, Kecamatan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo. Penentuan informan penelitian dengan snowball sampling, Perangkat Desa Sumberbendo dan Staff dari PT. POS sebagai informan utama dan masyarakat penerima program Cadangan Beras Pemerintah (CBP) di Desa Sumberbendo, Kecamatan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo sebagai informan tambahan. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumen. Data yang sudah didapatkan dalam penelitian kemudian dianalisis menggunakan analisis data model Miles dan Huberman, yaitu pengumpulan data, reduksi data, data Display, dan penarikan kesimpulan (Yusuf, 2017:407)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Hasil penelitian Implementasi Program Cadangan Beras Pemerintah (CBP) di Desa Sumberbendo Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo adalah sebagai berikut.

A. Cadangan Beras Pemerintah (CBP)

1. Sosialisasi

Perangkat Desa Sumberbendo bertanggung jawab atas pelaksanaan sosialisasi program Cadangan Beras Pemerintah (CBP). Dalam pelaksanaannya, Perangkat Desa telah memilih pendekatan tidak langsung dengan hanya mendistribusikan undangan kepada warga yang dianggap berada dalam kondisi ekonomi yang kurang

mampu. Dalam undangan tersebut, terdapat informasi rinci mengenai program CBP, termasuk persyaratan dan berkas yang harus diserahkan kepada perangkat desa agar dapat menjadi Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Dengan pendekatan ini, perangkat desa berusaha memastikan bahwa informasi dan bantuan yang diberikan berjalan dengan lancar dan efektif.

2. Registrasi

Dalam proses registrasi program Cadangan Beras Pemerintah (CBP), masyarakat Desa Sumberbendo berpartisipasi dalam mengumpulkan dan menyusun dokumen-dokumen yang diperlukan untuk mendaftar ke program CBP yang dibantu oleh perangkat desa. Dimana para penerima bantuan harus memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah, yakni data kependudukan, data ekonomi, dan kondisi sosial. Proses seleksi penerima KPM tersebut dilakukan oleh BPS sebelum akhirnya diserahkan kepada Kementerian Sosial dan kemudian ke tingkat desa/PT Pos Indonesia.

3. Penyaluran

Dalam penyaluran distribusi Cadangan Beras Pemerintah (CBP), terdapat kendala yang muncul ketika pelaksanaannya. Dimana penyaluran yang dilakukan tidak sesuai dengan aturan/SOP yang telah ditetapkan. Dalam penyaluran tersebut, jadwal seringkali tertunda karena beras yang dikirim dalam satu truk harus dibagi ke dua desa. Selain penundaan jadwal karena terhambatnya distribusi beras, undangan pelaksanaan program juga tidak terdapat tanggal yang pasti. Dimana perangkat desa harus melakukan konfirmasi kepada PT Pos Indonesia mengenai undangan pembagian bantuan tersebut.

B. Faktor-Faktor Implementasi Program Bantuan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) di Desa Sumberbendo

Berdasarkan Observasi yang telah dilakukan, terdapat beberapa faktor pendukung keberhasilan Implementasi Program Bantuan Beras Cadangan Pangan Pemerintah (CBP) di Desa Sumberbendo. Berikut beberapa faktor pendukung implementasi sesuai dengan teori Edward III :

1. Komunikasi

Komunikasi dalam Implementasi Program Bantuan Beras Cadangan Pemerintah di Desa Sumberbendo ini berkaitan dengan Sosialisasi Program. Untuk Sosialisasi Program dilaksanakan secara tidak langsung yakni melalui pembagian selebaran Undangan yang berisikan informasi terkait penerima bantuan dan berkas yang perlu dibawa saat pengambilan bantuan yang berlokasi di balai desa Sumberbendo. Namun untuk Informasi terkait Tujuan dari program ini tidak tertulis dalam selebaran yang dibagikan kepada masyarakat, sehingga sosialisasi terkait program belum cukup baik. Berdasarkan hasil wawancara masyarakat hanya mengetahui sebatas bahwa program ini merupakan bantuan sosial dan masyarakat tidak mengetahui bagaimana mekanisme program Bantuan Cadangan Beras Pemerintah

2. Sumberdaya

Sumberdaya dalam Implementasi program ini terbagi menjadi 3 Sumberdaya yakni Sumberdaya Waktu, Fasilitas, dan Manusia. Sumberdaya Waktu dalam pelaksanaan program ini dapat dilihat dalam proses penyaluran bantuan yang hanya membutuhkan waktu kurang dari 1 Hari. Selanjutnya untuk sumber daya fasilitas yang tersedia dan digunakan dalam pelaksanaan program bantuan beras cadangan

pangan Pemerintah juga sudah memadai. Sedangkan untuk Sumber Daya Manusia (SDM) dalam pelaksanaan Program oleh Perangkat Desa Sumberbendo sudah memadai, karena dalam pelaksanaan tidak membutuhkan Sumber Daya Manusia yang banyak.

3. Disposisi

Respon Pelaksana dari Perangkat Desa Sumberbendo terhadap Program Bantuan Pangan Cadangan Beras Pemerintah sudah cukup baik, Pelaksana menyatakan bahwa program ini merupakan program yang sangat berguna dan penting bagi masyarakat penerima bantuan. Dan respon dari masyarakat penerima bantuan terhadap program Bantuan Pangan ini sudah cukup baik, Karena dengan adanya program bantuan ini dapat meringankan beban masyarakat untuk mencukupi kehidupan sehari-hari khususnya untuk keperluan bahan pangan beras yang akhir-akhir ini mengalami kenaikan harga. Serta Kualitas Beras yang diterima cukup baik.

4. Struktur Birokrasi

Struktur Birokrasi pada Program Bantuan Cadangan Beras Pemerintah ini cukup baik, Serta dalam proses pelaksanaannya sudah sesuai dengan SOP (*Standard Operating Procedure*) yang berlaku. SOP tersebut meliputi Kesesuaian Penerima dengan berkas dan undangan yang didapatkannya.

Pembahasan

A. Implementasi Program Bantuan Pangan Cadangan Beras Pemerintah di Desa Sumberbendo Kecamatan Sumberasih

Pelaksanaan serangkaian tahapan Program CBP di Desa Sumberbendo, Kecamatan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo secara umum telah berlangsung sesuai dengan arahan pemerintah. Proses dimulai dengan sosialisasi oleh perangkat desa, yang menyampaikan informasi melalui pengiriman langsung kartu undangan kepada masyarakat. Kartu undangan tersebut berisi persyaratan berkas yang harus dipenuhi oleh setiap individu. Namun sejauh ini, masyarakat belum mendapat pemahaman umum mengenai keberadaan program ini, yang diakui sebagai upaya pemerintah untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat dan mengatur harga beras di pasar. Ditambah dengan masyarakat menunjukkan kurang antusias dalam memahami tentang Program Cadangan Beras Pemerintah (CBP). Mereka lebih cenderung hanya berfokus pada menerima bantuan tanpa memperhatikan maksud dan tujuan dari program tersebut. Tingkat pemahaman masyarakat di Desa Sumberbendo ini juga masih terbatas terkait dengan mekanisme detail dari Program CBP.

Dengan demikian, komunikasi menjadi hal yang sangat penting dalam suatu kebijakan. Dimana menurut George Edward III dalam Kogoya et al., (2020), komunikasi menjadi hal yang penting dalam pelaksanaan kebijakan publik dalam suatu organisasi publik, khususnya dalam konteks pemangku kepentingan. Edward III menekankan bahwa keberhasilan pelaksanaan kebijakan publik tergantung pada komunikasi efektif antara pelaksana kebijakan/program dengan pemangku kepentingan atau masyarakat umum. Oleh karena itu, penting untuk menyampaikan informasi kebijakan dengan jelas kepada para pelaksana, penerima program, dan pihak terkait agar semua pihak mengetahui persiapan dan pelaksanaan yang dibutuhkan. Namun, implementasi program Cadangan Beras Pemerintah (CBP) di Desa Sumberbendo belum mencapai tujuannya, hal tersebut dikarenakan

kurangnya komunikasi efektif dalam menyampaikan informasi terkait kebijakan tersebut.

Proses registrasi di Desa Sumberbendo diselenggarakan secara bersamaan dengan kegiatan sosialisasi. Pada seleksi penerima bantuan KPM dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) sebelum akhirnya hasilnya diserahkan kepada Kementerian Sosial dan selanjutnya ke tingkat desa atau PT Pos Indonesia. Pemerintah telah menetapkan kriteria penerima bantuan, seperti tidak memiliki barang dalam rumah dengan nilai lebih dari 1 juta, lantai tanpa keramik, makan dua kali sehari, dan pembelian pakaian dalam setahun sebanyak satu kali. Oleh karena itu, proses pendaftaran di Desa Sumberbendo hanya melibatkan 484 KPM pada tahap pertama, dan 461 KPM pada tahap kedua.

Reduksi jumlah penerima bantuan pada tahap kedua terjadi karena adanya sensus penduduk yang menunjukkan bahwa beberapa individu dianggap sudah mampu, berdasarkan data yang diperoleh dari BPS. Meskipun ada upaya untuk menyusun data yang akurat, masih terdapat ketidakvalidan dalam informasi tersebut. Salah satu permasalahan yang muncul adalah adanya penduduk yang sebenarnya mampu, tetapi masih terdaftar sebagai masyarakat tidak mampu dalam *database*. Meskipun perangkat desa telah berusaha memperbarui data dengan mengirimkan informasi kepada pemerintah atau pusat, namun terkendala dalam menghapus entri data yang tidak sesuai, khususnya terkait masyarakat yang seharusnya tidak terkategori sebagai masyarakat miskin. Situasi ini timbul karena informasi terbaru yang disampaikan oleh perangkat desa tidak berhasil diterima dengan baik oleh pihak otoritas pusat. Kejadian ini mencerminkan ketidakcukupan kebijaksanaan dalam pelaksanaan kebijakan oleh pemerintah. Kurangnya koordinasi dan komunikasi antara tingkat lokal dan pusat berdampak negatif pada efektivitas pelaksanaan kebijakan, yang pada gilirannya dapat merugikan masyarakat.

Pada tahapan registrasi, tugas utama yang diemban oleh perangkat desa adalah mengundang Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang berada di Desa Sumberbendo dan menyediakan nomor antrian untuk pembagian beras. Pada fase ini, masyarakat diberi informasi oleh perangkat desa untuk membawa Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) guna memperoleh bantuan beras dari pemerintah. Perlu dicatat bahwa peserta penerima manfaat di Desa Sumberbendo ini cenderung didominasi oleh orang tua, sehingga selama proses registrasi banyak dari mereka diwakili oleh anggota keluarganya yang tercantum dalam satu Kartu Keluarga.

Dalam tahap pelaksanaan penyaluran di Desa Sumberbendo menghadapi beberapa kendala. Terdapat ketidaksesuaian dengan aturan dan SOP yang telah ditetapkan, menyebabkan terjadinya kelambatan dalam jadwal penyaluran. Salah satu permasalahan yang sering muncul adalah penundaan karena beras yang dikirim dalam satu truk harus dibagi ke dua desa. Meskipun begitu, penyaluran beras berhasil dilaksanakan dengan baik, yakni dipastikan bahwa warga yang terdaftar menerima alokasi beras yang sesuai. Meski distribusi beras di Desa Sumberbendo berjalan lancar, terdapat kasus dimana sejumlah beras dicuri oleh pihak tertentu yang menyebabkan jumlah beras yang dibagikan menjadi kurang dari yang seharusnya.

Selain itu, kendala lain muncul dengan tidak adanya tanggal pasti pada undangan pelaksanaan program tersebut. Para perangkat desa kini dihadapkan pada tugas untuk melakukan konfirmasi kepada PT Pos Indonesia terkait undangan pembagian bantuan. Situasi ini menciptakan tantangan yang memerlukan koordinasi yang lebih intensif dan komunikasi yang efektif agar program dapat berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat maksimal kepada masyarakat yang membutuhkan.

Dalam penyaluran bantuan pangan tersebut diurus oleh PT Yasa Artha Trimanunggal, dimana tidak ada biaya yang dikenakan dalam distribusi bantuan tersebut. Jika ada biaya yang dipungut oleh petugas, dapat dilaporkan dengan menghubungi Penanggung Jawab di Kantor Pusat PT Yasa Artha Trimanunggal dan menyertakan bukti terkait. Saat proses penyerahan, akan dilakukan pengumpulan data *geotagging* dan foto PBP (Penerima Bantuan Pangan) oleh Juru Serah. Pendataan ini menggunakan YASA APP, dimana masyarakat diminta berfoto diri dengan dokumen yang telah ditentukan, yaitu KTP dan kertas antrian dari perangkat desa. Meskipun pelaksanaannya berjalan dengan lancar, masih ada beberapa penerima yang mewakili keluarganya, sehingga ada kesalahan nama yang tidak sesuai dengan KTP.

B. Faktor Faktor Yang mempengaruhi Implementasi Program Bantuan Pangan Cadangan Beras Pemerintah di Desa Sumberbendo

Berikut beberapa faktor yang mempengaruhi implementasi Program Bantuan Pangan Cadangan Beras Pemerintah menurut George Edward III dalam (Nabila et al., 2021) sebagai berikut :

1. Komunikasi

Bentuk Komunikasi dalam kegiatan ini berupa Penyampaian Informasi Terkait Penerimaan Program Bantuan Beras Cadangan Pemerintah serta beberapa berkas pendukung yang wajib dibawa oleh penerima Bantuan, yang dimana penyampaian informasi ini melalui selebaran undangan yang dibagikan oleh para perangkat dibantu oleh kader Desa untuk diberikan kepada Masyarakat Penerima Manfaat Desa Sumberbendo. Hal tersebut sesuai dengan yang dikemukakan oleh Edwards bahwa Kebijakan Publik harus disampaikan kepada semua pihak yang terlibat bukan hanya pada pelaksana kebijakan namun juga pada sasaran penerima manfaat. Pemberian Informasi harus disampaikan dengan jelas dan Konsisten agar tidak membingungkan masyarakat, namun pelaksanaan Penyampaian Informasi di lapangan belum tercapai. Dalam hal ini masyarakat masih belum mengetahui tujuan dari diadakannya program Bantuan Pangan Cadangan Beras Pemerintah, Masyarakat mengetahui sebatas bahwa program ini merupakan bantuan sosial dan masyarakat tidak mengetahui bagaimana mekanisme program Bantuan Cadangan Beras Pemerintah. Hal ini juga dikarenakan latar Belakang Pendidikan yang masih Rendah oleh mayoritas masyarakat penerima Manfaat di Desa Sumberbendo.

2. Sumber Daya

Sumber daya yang digunakan pada pelaksanaan program Bantuan Cadangan Beras Pemerintah di Desa Sumberbendo Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo terbagi menjadi tiga yakni Sumber Daya Fasilitas, Sumber Daya Waktu, Sumber Daya Manusia. Untuk Sumber Daya Waktu dalam Pelaksanaan Program ini Sudah Cukup Efisien, Karena Pelaksanaan distribusi bansos hanya membutuhkan waktu kurang dari 1 hari, meskipun pada saat penyaluran mengalami

keterlambatan yang diakibatkan karena beras yang dikirim dalam satu truk harus dibagi ke dua desa.

Selanjutnya untuk Sumber Daya Fasilitas juga sudah memadai hal ini dapat dilihat dalam proses penyerahan bantuan, yang dimana terdapat pendataan data geotagging dan foto PBP (Penerima Bantuan Pangan) Oleh Juru serah, Proses Pendataan ini menggunakan YASA APP, dimana Penerima Manfaat diminta berfoto diri dengan dokumen yang telah ditentukan. Hal ini dilakukan untuk mengurangi terjadinya ketidaksesuaian penerima dengan data yang telah dikumpulkan penerima.

Kemudian Untuk Sumber Daya Manusia dalam pelaksanaan Program Bantuan Pangan Cadangan Beras Pemerintah di Desa Sumberbendo dilaksanakan oleh Perangkat Desa Sumberbendo sudah memadai. Dalam pelaksanaannya Perangkat Desa Sumberbendo juga dibantu oleh Juru Serah dari PT Yasa Artha Trimanunggal/ PT POS Indonesia.

3. Disposisi

Dalam Hal ini disposisi dapat dilihat dari sisi respon pelaksana Program dan juga Penerima Manfaat Program. Sikap/Karakter Pelaksana berpengaruh pada keberhasilan suatu program seperti yang dikemukakan oleh Edward dalam (Nabila et al., 2021) Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Cadangan Beras Pemerintah ini mendapat respon positif dari pihak Perangkat Desa Sumberbendo selaku Pelaksana. Hal ini dikarenakan program ini sangat berguna dan penting bagi masyarakat yang kurang mampu di Desa Sumberbendo, serta sudah dilaksanakan sesuai dengan pedoman untuk mencapai tujuan yang diharapkan.

Disposisi juga dilihat dari sisi respon Masyarakat, dalam hal ini pelaksanaan program ini mendapatkan respon positif dari masyarakat karena dengan adanya program ini dapat membantu meringankan beban dalam mencukupi kehidupan sehari-hari khususnya pada bahan pangan beras yang akhir-akhir ini mengalami kenaikan harga. Masyarakat juga puas dengan beras yang diterima dalam kondisi yang baik yakni tidak berketu.

4. Struktur Birokrasi

Struktur Birokrasi pada Program Bantuan Pangan Cadangan Beras Pemerintah ini cukup baik, Hal ini dapat dilihat pada saat proses registrasi Masyarakat Penerima Bantuan yang dimana dalam proses tersebut penerima diwajibkan untuk memberikan berkas pendukung. Proses seleksi kemudian dilakukan oleh BPS sebelum akhirnya diserahkan kepada pihak Kementerian Sosial dan dilanjutkan oleh Pihak PT POS dan Desa. Serta dalam proses pelaksanaannya sudah sesuai dengan SOP (*Standard Operating Procedure*) yang berlaku. SOP tersebut meliputi Kesesuaian Penerima dengan berkas dan undangan yang didapatkannya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program Cadangan Beras Pemerintah di Desa Sumberbendo Kecamatan Sumberasih dapat dianggap berhasil secara keseluruhan dan sesuai aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Meskipun demikian, terdapat beberapa kendala yang muncul dalam berbagai tahap pelaksanaannya. Kendala-kendala tersebut mencakup aspek sosialisasi, registrasi, dan penyaluran. Kesuksesan program ini turut dipengaruhi

oleh faktor-faktor implementasi, terutama dalam hal komunikasi kebijakan yang masih mengalami kekurangan dalam menyampaikan informasi kepada warga. Dalam hal sumber daya, terdapat kendala waktu dalam proses distribusi bantuan sosial, terutama karena beras yang dikirim dalam satu truk harus dibagi ke dua desa. Meskipun demikian, aspek sumber daya manusia dan fasilitas berjalan dengan baik.

Faktor disposisi juga memainkan peran penting, di mana Perangkat Desa Sumberbendo dan masyarakat menunjukkan respon yang positif. Di sisi lain, struktur birokrasi terlihat berjalan cukup baik terutama selama proses registrasi Masyarakat Penerima Bantuan. Dengan demikian, untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program ini secara keseluruhan, penting untuk meningkatkan komunikasi kebijakan, mengatasi kendala distribusi, dan lebih menyempurnakan struktur birokrasi untuk memastikan efisiensi dan kepatuhan pada setiap tahapan program.

DAFTAR PUSTAKA

- Ayuningtyas, N. N. (2019). Pengaruh Inflasi Dan Pertumbuhan Penduduk Terhadap Tingkat Pengangguran Di Kota Samarinda. *Jurnal Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Mulawarman*, 1–12. <http://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/JIEM/article/view/3790>
- Hardinandar, F. (2019). Determinan Kemiskinan (Studi Kasus 29 Kota/Kabupaten Di Provinsi Papua). *Jurnal REP (Riset Ekonomi Pembangunan)*, 4(1), 1–12. <https://doi.org/10.31002/rep.v4i1.1337>
- Kogoya, O., Ogotan, M., & Londa, V. (2020). Implementasi Program Beras Sejahtera di Desa Guburini Kecamatan Makki Kabupaten Lanny-Jaya. In *Jurnal Administrasi Publik*.
- Kurnia, A. W., Sundari, S., & Purwanto, D. A. (2020). Implementasi Kebijakan Cadangan Pangan Nasional dalam Kondisi Keadaan Darurat di Badan Ketahanan Pangan Guna Mendukung Pertahanan Negara. *Manajemen Pertahanan: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Manajemen Pertahanan*, 6(1).
- Mangende, H. D., Rumapea, P., & Palar, N. A. (2016). Implementasi Kebijakan Penyaluran Beras Rakyat Miskin Di Desa Poopoh Kecamatan Tombariri Kabupaten Minahasa. *Jurnal Administrasi Publik*, 1(37).
- Muslim, H. P., Eriyanti, F., & Mubarak, A. (2019). Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (Bpnt) Di Kecamatan Kuranji Kota Padang. *Jurnal Manajemen Dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)*, 2(1), 60–68. <https://doi.org/10.24036/jmiap.v1i2.19>
- Nabila, K., Suharso, P., & Hartanto, W. (2021). *IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) DI DESA PALERAN KECAMATAN UMBULSARI KABUPATEN JEMBER*. 15. <https://doi.org/10.19184/jpe.v15i2.21327>
- PERATURAN BADAN PANGAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG PENYELENGGARAAN CADANGAN BERAS PEMERINTAH.
- Priseptian, L., & Primandhana, W. P. (2022). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan. *Forum Ekonomi*, 24(1), 45–53. <https://doi.org/10.30872/jfor.v24i1.10362>